

EVALUASI PROGRAM INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH BERBASIS MASYARAKAT DI RT 06 KELURAHAN KROMAN, KECAMATAN GRESIK, KABUPATEN GRESIK

Khofifah Nur Illahi

S1 Ilmu Administrasi Negara, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
khofifah.18015@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Program Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) merupakan program yang diimplementasikan melalui Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) guna mengentas masalah sanitasi sektor air limbah. Kabupaten Gresik memfokuskan program IPAL di wilayah perkotaan diantaranya Kelurahan Kroman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi Program IPAL di RT 06 Kelurahan Koman dengan fokus penelitian berdasarkan kriteria evaluasi menurut Willian N Dunn yakni: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data berupa sekunder yakni observasi dan wawancara serta sumber data primer berupa dokumen/arsip. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data berupa model interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian pada Evaluasi Program IPAL Berbasis Masyarakat di RT 06 Kelurahan Kroman yaitu: 1) Efektivitas; dikatakan belum optimal karena pelaksanaan uji kualitas kadar air belum memenuhi Perda dan kurangnya kesadaran Kelompok Pengelola Pemelihara (KPP) untuk merawat IPAL. 2) Efisiensi; pembangunan IPAL dinilai baik karena mendapat bantuan dana dari USRI. Sedangkan biaya operasional belum optimal karena sedikitnya partisipasi masyarakat. 3) Perataan; dikatakan optimal karena pendistribusian program sudah dimanfaatkan masyarakat hampir menyeluruh. 4) Kecukupan; dikatakan optimal karena program IPAL memberikan banyak kebermanfaatn. 5) Responsivitas; respon masyarakat dinilai baik namun kesadaran masyarakat masih kurang. 6) Ketepatan; dinilai optimal karena program IPAL mampu menjadi solusi dalam penanganan masalah sanitasi. Saran dari penelitian ini adalah KPP dan masyarakat sebaiknya mengadakan perawatan IPAL berdasarkan aturan Undang-Undang. Kemudian pemerintah juga perlu meninjau, mengevaluasi, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Sanitasi, Evaluasi, IPAL, Limbah rumah tangga.

Abstract

Installation Program Wastewater Management (WWTP) is a program implemented through the Acceleration Program Sanitation Settlements (PPSP) for use get rid of problem sanitation wastewater sector. Gresik Regency focuses the WWTP program in region urban of them Ward Kroman. Study this aim for analyze and evaluating the IPAL Program in RT 06 Kelurahan Commander with focus study based on criteria evaluation according to Willian N Dunn namely: effectiveness, efficiency, adequacy, smoothing, responsiveness, and accuracy. Study this use type study qualitative with data source in the form of secondary that is observation and Interview as well as primary data sources in the form of documents/archives. Study this use technique data collection in the form of interviews, observations, and documentation. As for technique data analysis in the form of interactive model Miles and Huberman. Results study on Based WWTP Program Evaluation society in RT 06 Kelurahan Kroman namely: 1) Effectiveness; said not optimal because implementation test quality water level yet Fulfill local regulations and lack of awareness Group Manager Maintenance (KPP) for treat IPAL. 2) Efficiency; WWTP development assessed good because get help fund from USRI. Whereas cost operational not optimal because at least participation society. 3) Alignment; is said to be optimal because program distribution has been utilized Public almost thorough. 4) Adequacy; is said to be optimal because the WWTP program provides many usefulness. 5) Responsiveness; response Public rated good however awareness Public still less. 6) Accuracy; considered optimal because the IPAL program is able to Becomes solution in handling problem sanitation . Suggestion from study this is KPP and Public should stage WWTP treatment based on rule law. Then government also need review, evaluate, and give socialization to society.

Keywords: Sanitation, Evaluation, WWTP, Waste house ladder.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menduduki peringkat keempat dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada hasil sensus penduduk tahun 2020 disebutkan bahwa Pulau Jawa menjadi pusat konsentrasi sebaran penduduk Indonesia dengan jumlah 151,59 juta penduduk atau 56.10 persen penduduk Indonesia. Salah satu penyebab tingginya jumlah kepadatan penduduk terutama di Pulau Jawa disebabkan adanya fenomena urbanisasi yang melonjak tinggi.

Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk disertai volume laju urbanisasi yang tinggi dinilai memberikan dampak besar bagi kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan tinggal. Fenomena urbanisasi yang tinggi dapat memicu timbulnya permasalahan sosial dan lingkungan diantaranya; semakin berkembangnya pemukiman kumuh, terciptanya masalah lingkungan, kekurangan lahan untuk bermukim dan masalah-masalah sosial lainnya yang kini sedang dihadapi oleh sejumlah kota-kota besar di Indonesia. (Novianty dan Kurniawan, 2021)

Wilayah urbanisasi pada kota padat penduduk cenderung memiliki kualitas air dan sanitasi yang rendah sehingga dapat memicu terjadinya pencemaran lingkungan. UNICEF dalam (Rheingans, 2005) mengungkapkan bahwa "*water quality and sanitation are irrevocably intertwined. Poor sanitation leads to water contamination is due to sewage and human waste*" (kualitas air dan sanitasi saling terkait. Sanitasi yang buruk menyebabkan pencemaran air karena limbah dan kotoran manusia)

Sanitasi diartikan sebagai upaya untuk mencegah penyakit yang diakibatkan oleh aktivitas manusia agar terciptanya kesehatan pada lingkungan hidup manusia (Prastowo, 2016). Sedangkan Menurut R. Sjarief dalam (Tendean dkk, 2014) air limbah rumah tangga didefinisikan sebagai limbah baik yang berasal dari tinja (kotoran manusia) maupun air sisa bekas aktivitas dapur, kamar mandi dan cuci yang tidak dapat digunakan kembali.

Manusia membutuhkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti mandi, mencuci, minum, dan sebagainya. Namun air bersih yang telah digunakan untuk aktivitas rumah tangga tersebut akan berubah menjadi air limbah dengan presentase sebanyak 80 persen (Ulum dkk, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas manusia sudah dipastikan menghasilkan air limbah, sedangkan air limbah merupakan zat yang paling berbahaya dari sekian banyaknya aktivitas manusia. (Hasibuan, 2016). Data dari Badan Pusat

Statistik (BPS) pada tahun 2021 menyebutkan bahwa lebih dari 50 persen masyarakat Indonesia masih membuang air limbah rumah tangga langsung kedalam selokan maupun sungai tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Hal ini akan berdampak pada kualitas ekosistem lingkungan.

Dhinny, 2015 dalam (Bintoro, 2018) mengungkapkan bahwa keberadaan ekosistem berperan penting dalam pengolahan air, khususnya air limbah. Hal ini dikarenakan keberadaan ekosistem sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup yang terancam akibat adanya air limbah. Adapun *Environmental Performance Index (EPI)* Negara Indonesia dalam (Tatik dan Tauran, 2022) menyebutkan bahwa pada tahun 2014 kualitas lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan skor 44,36 dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tingkat kualitas lingkungan hidup yang rendah.

Tinja atau kotoran manusia juga merupakan limbah rumah tangga yang menjadi permasalahan bagi pemerintah. Hal ini dapat dilihat data pada STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) per Januari 2020 disebutkan bahwa masyarakat Indonesia masih mempraktikkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) dengan jumlah 8,6 juta rumah tangga. Adapun sebanyak 4,5 juta rumah tangga dari data tersebut berasal dari Pulau Jawa (kompas.com).

Fenomena dari paparan diatas merupakan bagian dari masalah sanitasi yang sering dijumpai di wilayah kota padat penduduk. Baik atau buruknya kualitas sanitasi akan mempengaruhi kondisi masyarakat yang tinggal. Pada tahun 2017, *World Health Organization (WHO)* menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan kualitas sanitasi terburuk di dunia dan menjadi peringkat terendah kedua di lingkup Negara Asean setelah Myanmar.

Melihat permasalahan tersebut pemerintah perlu melakukan penanganan melalui pengelolaan terhadap air limbah rumah tangga untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh hak untuk mendapatkan akses layanan sanitasi yang bersih, aman, dan layak sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan terbebas dari penyakit (Anggraini, 2017)

Upaya pemerintah dalam menangani masalah sanitasi diwujudkan melalui Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program PPSP merupakan program yang telah berjalan sejak tahun 2010 dengan focus pada pengadaan pembangunan sanitasi. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan program *Sustainable Development Goals (SDGs)* tahun 2030, dimana dalam

(Rahmadani dkk, 2020) diungkapkan bahwa tujuan dari program tersebut yakni untuk menciptakan akses sanitasi yang bersih dan dapat dirasakan secara menyeluruh, serta meninggalkan kebiasaan BAB secara sembarangan.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terpilih sebagai peserta PPSP pada tahun 2011 (Peraturan Presiden Nomor 5, 2010). Hal ini didasarkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki potensi besar di sektor industri sehingga berpotensi mengalami peningkatan laju urbanisasi.

Berdasarkan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, disebutkan bahwa isu dan permasalahan aspek teknis air limbah di Kabupaten Gresik ditimbulkan oleh beberapa sebab, diantaranya:

1. tingkat kesadaran masyarakat yang kurang untuk tidak melakukan BABS
2. Masih kurangnya dana APBD untuk pengelolaan air limbah
3. Saluran antara limbah domestik dan drainase masih menjadi satu
4. Kurangnya jumlah IPAL Komunal, IPAL Kawasan, dan MCK pada tiga Kecamatan Kota
5. Jumlah kapasitas IPLT yang melayani limbah cair rumah tangga masih kurang.

Langkah pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Gresik diawali dengan penelitian kondisi secara langsung di lapangan oleh tim EHRA (Environment Health Risk Assesment) yang dibentuk oleh Bappeda Kabupaten Gresik pada tahun 2011. Hasil pengkajian EHRA mengemukakan bahwa tingkat pencemaran air limbah rumah tangga di Kabupaten Gresik sebanyak 66% dengan tangki saptik sebagai penyebab utama dan penyebab lain yakni saluran pembuangan/ drainase air limbah tanpa pengolahan. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2012 menyusun langkah-langkah dalam percepatan PPSP dengan melakukan pembaharuan pada komposisi pokja sanitasi melalui SK Bupati Gresik.

Tabel 1. Road Map PPSP Kabupaten Gresik

No	Kegiatan	2010	2011	2012	2013
1.	Surat Minat				
2.	Pembentukan Pokja Sanitasi				
3.	Penyusunan Buku Putih Sanitasi				
3.	Penyusunan SSK				
5.	Pembaharuan Pokja Sanitasi				

6.	Implementasi dan Monev				
----	------------------------	--	--	--	--

Sumber: PPSP Kabupaten Gresik 2014

Pelaksanaan PPSP di Kabupaten Gresik mulai diimplementasikan pada awal tahun 2013 dengan fokus pelaksanaan program pada tiga kecamatan kota, diantaranya adalah Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Kebomas. Ketiga Kecamatan tersebut merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi di Kabupaten Gresik.



Gambar 1. Peta Sebaran Pemukiman Padat Penduduk 3 Kecamatan Kota di Kab. Gresik

Sumber: SPKP Dinas PU Kabupaten Gresik

Implementasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dilaksanakan di tiga Kecamatan Kota tersebut juga difokuskan pada wilayah yang memiliki kualitas sanitasi rendah dan merupakan wilayah kumuh di Kabupaten Gresik. Hal ini mengacu pada SK Bupati Gresik No. 050/970/HK/437.12/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, disebutkan bahwa terdapat 50 kelurahan/desa yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh di Kabupaten Gresik. Jumlah wilayah yang masuk kedalam wilayah kumuh di Kecamatan Gresik yakni sebanyak 13 desa/ kelurahan salah satunya adalah Kelurahan Kroman.

Kelurahan Kroman merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh kategori berat dengan luas kawasan sebesar 1,64 Ha. Hal ini menjadikan Kelurahan Kroman ditetapkan sebagai wilayah yang masuk kedalam wilayah penanganan kumuh pada 8 dari 50 lokasi yang telah ditetapkan. Selain itu Kelurahan Kroman juga ditetapkan sebagai area yang beresiko sangat tinggi terhadap air limbah serta memiliki kualitas sanitasi yang buruk dengan pola hidup sebagian besar masyarakatnya yang belum sehat.

Setiap warga berhak mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang baik dan sehat sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1). Hal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting untuk mewujudkan hak setiap warga negara dalam memperoleh lingkungan tempat tinggal atau

kawasan yang sehat, bersih, dan layak agar terciptanya kualitas hidup masyarakat yang baik, sehat, dan sejahtera (Putri dan Megawati, 2021)

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menjunjung hak masyarakat dalam memperoleh kualitas lingkungan yang baik dan sehat yakni dengan diadakan penanganan masalah sanitasi melalui program PPSP adalah membangun fasilitas sistem perpipaan berupa instalansi pengolahan air limbah (IPAL) oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pembangunan program IPAL pada tahun 2013 di Kabupaten Gresik difokuskan sebanyak 46 unit IPAL yang bekerja sama dengan program USRI (*Urban Sanitation and Rurel Infrastructure*) dan DAK (Dana Alokasi Kegiatan)

Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola limbah cair biologis maupun kimiawi yang dikelola secara terpusat untuk menanganai masalah sanitasi sub sektor air limbah. Pembangunan program IPAL oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui Program USRI dan DAK dilakukan secara Komunal yakni mencakup sekelompok rumah tangga. Adapun tujuan diadakannya program IPAL adalah untuk membantu masyarakat dalam mengelola air limbah rumah tangga, serta membantu dalam memberdayakan masyarakat sehingga dampak yang dirasakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang bersangkutan secara berkelanjutan.

Kelurahan Kroman menjadi salah satu lokasi pembangunan IPAL oleh Program USRI di tahun 2013 yang didasarkan pada PERDA Kabupaten Gresik No. 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bahwa lokasi pelaksanaan IPAL diutamakan pada wilayah padat penduduk non perumahan. Hal demikian juga mempertimbangkan kondisi Kelurahan Kroman pada tahun 2013 yang masyarakatnya memiliki pola hidup belum sehat, seperti kebiasaan BABS di sungai karena tidak memiliki jamban pribadi. Sebagian besar masyarakat juga belum memiliki saluran pembuangan air limbah rumah tangga berupa saluran perpipaan atau IPAL. Hal ini menjadikan masyarakat Kroman langsung membuang air limbah rumah tangga kedalam kali sekitar tanpa melalui proses pengolahan.

Pembangunan program IPAL secara komunal di Kelurahan Kroman dilaksanakan pada akhir tahun 2013 dengan letak pembangunan di RT 06 RW 02 Kelurahan Kroman. Adapun nama IPAL yang didirikan tersebut diberi nama IPAL Karang Pasung. Lahan yang digunakan dalam pembangunan IPAL merupakan lahan jalan umum masyarakat RT 06 Kelurahan Kroman dengan ukuran lahan sebesar 5 x 10 meter yang mampu menampung sebanyak 75 Sambungan Rumah (SR).

Pada awal pembangunan IPAL sebagian besar masyarakat RT 06 Kelurahan Kroman tidak mendukung dan menentang karena menganggap bahwa IPAL dapat membahayakan warga seperti takut meledak dan muncul bau tidak sedap.



Gambar 2. Lahan Pembangunan RT 06 Kelurahan Kroman Tahun 2014

Sumber: Program Percepatan Sanitasi Permukiman *Road Map* Kab. Gresik Dalam PPSP (2014)

Sebuah program yang berjalan tentunya akan memberikan dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang terlibat. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi Program Instalansi Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat di RT 06 Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Tujuan adanya evaluasi tidak hanya ditujukan untuk mengetahui sebab kegagalan atau dampak yang dirasakan saja, melainkan evaluasi juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui nilai “manfaat” dari suatu kebijakan atau program yang telah dijalankan (Akbar, 2018).

Evaluasi diartikan sebagai penaksiran, pemberian rating/ angka, penilaian, serta tulisan atau kata yang menyampaikan bentuk analisis terhadap hasil suatu kebijakan (William N. Dunn, 2003). Dalam mengukur evaluasi sebuah program kebijakan, William N Dunn (2003) mengemukakan enam indikator pengukuran evaluasi program/kebijakan yaitu:

1. Indikator Efektivitas, berisikan pengukuran antara tujuan yang hendak dicapai dengan hasil yang telah tercapai.
2. Indikator Efisiensi, berisikan sejumlah usaha yang dilakukan melalui rasionalitas ekonomi berupa biaya program/kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu.
3. Indikator Kecukupan, berisikan kebermanfaatannya dari adanya suatu program/kebijakan yang dinilai telah memenuhi kecukupan dalam berbagai aspek permasalahan.
4. Indikator Perataan, berisikan keadilan oleh pembuat kebijakan dalam pendistribusian program kepada seluruh masyarakat secara merata

5. Indikator Responsivitas, berisikan tanggapan masyarakat yang berupa dukungan atau tolakan terkait program yang dijalankan
6. Indikator Ketepatan, berisikan nilai kebermanfaatannya yang dihasilkan oleh program yang dijalankan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan evaluasi pada Program Instalasi Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat di RT 06 Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dengan mengukur evaluasi berdasarkan pada indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, serta indikator ketepatan. Adapun evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam evaluasi sumatif, karena kegiatan evaluasi dilakukan pada saat program IPAL Karang Pasung Kelurahan Kroman masih terus berjalan.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat maupun kelompok pengelola dan pemelihara IPAL di Kecamatan Gresik, khususnya KPP IPAL RT 06 Kelurahan Kroman. Serta menjadi bahan penelitian bagi peneliti yang hendak meneliti tema yang sama di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diartikan sebagai kegiatan untuk menganalisis, menggambarkan, serta meringkas kondisi dan situasi terhadap berbagai data yang dikumpulkan baik data hasil pengamatan (observasi) maupun hasil wawancara mengenai permasalahan yang sedang diteliti (I Made Winartha, 2006)

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Kelurahan Kroman merupakan wilayah padat penduduk yang beresiko sangat tinggi terhadap air limbah. Adapun subjek pada penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* (*non random*/ sampel ditentukan peneliti) dan *accidental sampling* (pengambilan sampel secara kebetulan). Subjek-subjek yang dimaksud terdiri atas ketua kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) IPAL Karang Pasung Kelurahan Kroman dan masyarakat pengguna IPAL Karang Pasung Kelurahan Kroman

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi literatur yang berupa jurnal, artikel ilmiah dan internet yang mengangkat tema dan studi kasus sama. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer didapatkan peneliti secara

langsung oleh informan berupa wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh peneliti melalui dokumen, arsip, dan catatan dari informan. Seluruh data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan proses analisis data dengan melalui 3 tahapan yakni Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi/ kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis, Kelurahan Kroman berada di sudut pesisir tengah Kota di Kabupaten Gresik. Adapun jumlah penduduk RT 06 Kelurahan Kroman adalah sebanyak 193 jiwa dengan 54 KK. Karakteristik warga RT 06 pengguna IPAL didominasi oleh warga yang bermata pencaharian sebagai buruh songkok, nelayan, dan pegawai swasta dengan penghasilan rata-rata masyarakat kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00,- sampai dengan Rp 3.000.000,00,- per bulan. Adapun mayoritas pengguna IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman bagi yang berusia 40 tahun keatas adalah tamatan SD dan SMP, sedangkan usia remaja bermayoritas tamatan SMA.

Sebelum adanya IPAL, sumber air bersih masyarakat berasal dari air tangki, air hujan, air PDAM, dan air sumur bor. Sedangkan sumber air limbah yang dihasilkan oleh masyarakat RT 06 pengguna IPAL terdiri atas air mandi, air kakus, air mencuci piring, dan air bekas mencuci pakaian (*laundry*). Untuk memenuhi kebutuhan Buang Air Besar, warga melakukan BAB di sungai/ jamban/ ponton umum, maupun WC tetangga/keluarga. Namun akses BAB melalui berbagai media tersebut masih belum dilengkapi dengan pengolahannya. Hasil limbah maupun kotoran yang dibuang tanpa melalui pengolahan tersebut dapat menjadikan lingkungan tercemar.

Kondisi sanitasi yang rendah tersebut menjadikan Kelurahan Kroman menjadi salah satu lokasi pembangunan Program IPAL oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui program USRI. Program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman menggunakan sistem pengolahan air limbah secara terpusat (*offsite*) yakni pengolahan air limbah yang menggunakan jaringan pipa sebagai sarana utama dalam proses penampungan air limbah untuk dialirkan ke tempat pemngolahan selanjutnya.

Evaluasi Program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman dilakukan oleh peneliti untuk menilai tingkat kinerja serta untuk menemukan kendala maupun masalah dalam proses pengolahannya. Sebagaimana evaluasi kebijakan menurut William N Dunn (2003) maka Evaluasi Program IPAL Berbasis Masyarakat di

RT 06 Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu kriteria evaluasi menurut William N Dunn yang berkenaan dengan pencapaian dari suatu alternatif apakah hasil yang diharapkan sudah mencapai tujuan dari adanya tindakan yang dijalankan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya. Agar dapat dikatakan efektif, air limbah yang sudah dikelola melalui system IPAL harus menghasilkan kualitas air yang sesuai dengan standar baku mutu air limbah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pasal 18 disebutkan bahwa pengujian kualitas air limbah wajib dilakukan setiap satu bulan satu kali. Sedangkan ketua KPP IPAL RT 06 Kelurahan Kroman dalam wawancara menyatakan bahwa pengujian kualitas air pada IPAL dilakukan hanya satu kali saja yakni pada tahun 2017.

“Pengujian kualitas air IPAL Karang Pasung ini pernah dilakukan sekali dan itu dilaksanakan pada tahun 2017. Dari pihak Dinas PU ini menyatakan bahwa hasil airnya bagus dan sesuai standar, kualitas airnya juga memang jernih. Bahkan saat itu airnya saya coba buat cuci tangan dan hasilnya aman. Jika kualitas airnya tidak bagus maka akan diisi bakteri baik kedalam IPAL nya. Tapi berhubung hasilnya bagus jadi tidak perlu diisi bakteri baik lagi” (wawancara pada tanggal 05 April, 2022)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kualitas kadar air yang dihasilkan IPAL RT 06 Kelurahan Kroman dinyatakan bagus dan aman, serta dinilai telah memenuhi syarat baku mutu air sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.68/Menhk/Setjen/Kum.1/82016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.



Gambar 3. Hasil uji kadar air limbah pada IPAL RT 06 Kelurahan Kroman tahun 2017

Sumber: Data observasi

Kualitas kadar air yang dihasilkan oleh sistem IPAL juga dipengaruhi oleh kapasitas dan jumlah pengguna IPAL. IPAL RT 06 Kelurahan Kroman memiliki kapasitas penampungan sebanyak 75 Sambungan Rumah (SR). Dari kapasitas tersebut pemanfaatan penggunaan IPAL oleh masyarakat RT 06 Kelurahan Kroman hingga tahun 2021 adalah sebanyak 34 Sambungan Rumah (SR). Hal tersebut dinyatakan masih layak pakai karena penggunaannya masih dibawah standart sehingga kualitas baku mutu air yang dihasilkan dinilai baik dan tidak melebihi batas kapasitas yang ditentukan.

Agar kinerja program IPAL dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya Kelompok Pengelola dan Pemelihara (KPP). Kecakapan kinerja anggota KPP memberikan pengaruh besar terhadap pengelolaan IPAL dalam jangka panjang. KPP IPAL merupakan sekelompok anggota yang berperan melakukan pemeliharaan IPAL dengan mengawasi jalannya limbah pada sistem perpipaan, mengadakan penyuluhan tentang kebersihan dan kesehatan, serta mengumpulkan biaya operasional melalui iuran yang telah disepakati bersama warga.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara disebutkan bahwa pada awal pembentukan KPP IPAL, hampir seluruh anggota telah menjalankan tupoksinya masing-masing sehingga IPAL RT 06 Kelurahan Kroman pernah meraih penghargaan sebagai KPP Berprestasi Kategori Pratama Tingkat Kabupaten pada tahun 2017. Namun peran anggota KPP IPAL RT 06 Kelurahan Kroman seiring berjalannya waktu kini menurun. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh ketua IPAL RT 06 Kelurahan Kroman

“KPP IPAL Karang Pasung ini pernah meraih penghargaan sebagai KPP berprestasi, tepatnya pada tahun 2017. Namun kinerja anggota KPP sekarang mulai menurun 50% karena tidak adanya regenerasi kepengurusan KPP dari periode awal kepengurusan” (wawancara pada tanggal 05 April, 2022)

Dari data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas dari program IPAL RT 06 Kelurahan Kroman dinilai belum optimal karena uji kualitas kadar air tidak dilakukan secara berkala sehingga kualitas air limbah yang dihasilkan terkini belum diketahui. Sedangkan dari segi kepengurusan KPP, tingkat kesadaran anggota untuk menjalankan tupoksinya kini menurun sehingga kinerja IPAL RT 06 Kelurahan Kroman juga berjalan kurang optimal.

2. Efisiensi

Efisiensi memiliki kaitan erat dengan efektivitas. Efisiensi menurut William N Dunn diartikan sebagai

sejumlah usaha yang dibutuhkan untuk mewujudkan hasil efektivitas yang hendak dicapai. Kriteria efisiensi berkaitan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan agar terwujudnya program/kebijakan sesuai harapan. Untuk terwujudnya sanitasi (sub sektor air limbah) yang aman, bersih, dan sehat melalui program IPAL tentunya memerlukan pembiayaan dalam proses pembangunannya.

Dari segi biaya, pelaksanaan program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman mendapat bantuan dana dari Program USRI (*Urban Sanitation and Rurel Infrastructure*). Program USRI merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang bertujuan untuk mengatasi masalah sanitasi masyarakat dengan pengimplementasian program pada 34 Kabupaten/kota yang telah memiliki Strategi Sanitasi Kota (SSK) salah satunya Kabupaten Gresik. Adapun bantuan dana dari Program USRI pada pembangunan IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman yakni kurang lebih sebesar 350 juta rupiah.



Gambar 4. Permukaan IPAL RT 06 Kelurahan Kroman

Sumber: Data observasi

Dalam pemanfaatannya, sebuah IPAL harus ada biaya operasional agar IPAL dapat berjalan dengan baik. Biaya operasional IPAL RT 06 Kelurahan Kroman dilakukan dengan pemanfaatan barang bekas seperti botol plastik, kaleng, kardus, dan semacamnya untuk dijual. Hasil penjualan barang bekas tersebut kemudian dimasukkan kedalam kas biaya perawatan IPAL. Ketua KPP IPAL RT 06 Kelurahan Kroman menyatakan bahwa tidak semua warga ikut berpartisipasi dalam pengumpulan barang bekas tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Prihatini Alfath, salah satu warga pengguna IPAL yang menyatakan sebagai berikut:

“Dulu seingat saya pernah diadakan urunan tiga ribu buat kas IPAL, tapi cuma berjalan sebentar. Kalau untuk pemanfaatan barang bekas saya kurang merhatiin, saya lupa kapan terakhir saya ngumpulin

barang bekas” (wawancara pada tanggal 06 November, 2021)

Jika dilihat dari segi waktu, proses pembangunan program IPAL RT 06 Kelurahan Kroman dinilai melebihi batas waktu yang telah ditetapkan yakni dengan estimasi waktu selama tiga bulan. Namun proses pembangunan IPAL RT 06 Kelurahan Kroman memakan waktu selama 6 bulan yakni dari bulan Desember 2013 hingga bulan Juni 2014. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ali Santoso selaku ketua KPP IPAL RT 06 Kelurahan Kroman dalam wawancara:

“Yang menyebabkan pembangunan IPAL nya lama itu karena tanah pada lahan merupakan tanah urukan, jadi ketika dibongkar banyak sampah-sampah plastik, kulit kerang, macam macam pokoknya. Ditambah lagi waktu itu bulan Desember musim hujan, itu tanahnya jadi sering longsor, dan kebetulan tenaga kerjanya juga kurang berpengalaman” (wawancara pada tanggal 06 November, 2021)

Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa indikator efisiensi pada IPAL RT 06 Kelurahan Kroman dari segi biaya pembangunan tidak mengalami kendala karena sudah tersedianya bantuan dana dari Program USRI. Sedangkan biaya operasional IPAL RT 06 Kelurahan Kroman dinilai belum optimal, karna masih banyak warga yang tidak ikut berpartisipasi dalam pengumpulan barang bekas. Adapun dari segi waktu, proses pembangunan Program IPAL dinilai kurang optimal karena prosesnya melebihi estimasi waktu yang telah ditentukan.

3. Kecukupan

Menurut William N Dunn kriteria kecukupan diartikan sebagai kriteria yang mencakup tolak ukur seberapa jauh suatu efektivitas dapat memuaskan kebutuhan dan nilai yang dianggap dapat menumbuhkan solusi dari sebuah masalah. Dalam hal ini indikator kecukupan memiliki hubungan dengan indikator efektivitas dimana adanya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil (*output*) yang diharapkan.

Sebelum diadakan program IPAL, hampir 85% masyarakat Kelurahan Kroman baik dari kalangan dewasa maupun anak anak memiliki pola hidup atau kebiasaan yang buruk, salah satunya adalah kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di kali maupun jamban umum sehingga rentan terjadi penyakit DBD, diare, gatal gatal dan penyakit kulit. Hal tersebut dilatar belakangi minimnya sarana buang air besar yang layak pada saat itu. Adapun sebagian kecil masyarakat yang tidak melakukan BABS pada saat itu dikarenakan telah memiliki tangki saptik individu.

Hal berbeda semenjak adanya program IPAL, kini seluruh warga RT 06 Kelurahan Kroman sudah memiliki saluran MCK yang layak. Presentase jumlah warga pengguna IPAL RT 06 saat ini adalah sebanyak 80% dan 20% lainnya adalah pengguna *saptic tank*. Kini seluruh masyarakat RT 06 Kelurahan Kroman sudah meninggalkan kebiasaan BABS di kali maupun jamban dan menerapkan pola hidup yang jauh lebih sehat sehingga resiko penyakit yang timbul menjadi berkurang.

Semenjak adanya program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman dinilai memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat pengguna. Berbagai pengaruh positif dari program IPAL sangat jauh dirasakan oleh masyarakat dibanding sebelum adanya program IPAL. Hal ini diungkapkan oleh ketua KPP IPAL RT 06 Kelurahan Kroman dalam wawancara:

“perbedaan sebelum dan sesudah adanya IPAL sangat jauh, dulu kebiasaan warga kalau BAB di kali, tapi sekarang semua warga sudah punya WC dan saluran pengolahannya, jadi akses sanitasinya lebih layak. Disisi lain tingkat pencemaran lingkungannya juga berkurang, kampungnya sekarang jadi jauh lebih bersih dan tertata, masyarakatnya pun juga lebih bersih dan sehat” (wawancara pada tanggal 06 November, 2021)

Hal ini dapat dilihat bahwa keberadaan program IPAL dinilai mampu menjadi solusi ditengah masalah sanitasi masyarakat serta memberikan pengaruh positif bagi pengguna baik bagi lingkungan, sosial, maupun kesehatan.

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara yang didapat dari informan dapat disimpulkan bahwa indikator kecukupan pada program IPAL RT 06 Kelurahan Kroman memberikan banyak kemudahan dan pengaruh positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Adanya program IPAL juga dinilai mampu menjadi solusi akses sanitasi di masyarakat. Dari segi lingkungan, dengan adanya program IPAL dapat mengurangi tingkat limbah yang tercemar. Dari segi kesehatan, dapat mengurangi resiko timbulnya penyakit. Dan dari segi sosial, dapat menciptakan citra yang baik terhadap masyarakat Kelurahan Kroman. Selain itu dengan adanya IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman ini dapat menjadikan kampung menjadi lebih bersih, sehat, dan rapi.

4. Perataan

Kriteria perataan dalam evaluasi sebuah program menunjuk pada distribusi terkait keadilan kepada masyarakat berbeda yang diberikan oleh sasaran kebijakan publik. William N Dunn menyatakan bahwa indikator perataan merupakan indikator yang berkaitan

dengan sosial dan rasional legal yang menunjuk pada distribusi oleh kelompok yang berbeda-beda kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Pembangunan program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman ini bersifat komunal, yakni mencakup sekelompok rumah tangga. Secara teknis, kapasitas IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman mampu menampung sebanyak 200 jiwa. Pada awal pembangunan IPAL, jumlah jiwa yang tergabung hanya sebanyak 68 jiwa saja. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat mulai menyadari bahwa program IPAL memberikan banyak kemudahan. Sehingga banyak warga yang akhirnya meminta bergabung untuk menggunakan IPAL. Data terakhir jumlah jiwa yang sudah tergabung kedalam IPAL RT 06 Kelurahan Kroman adalah sebanyak 46 KK/ 169 jiwa dari 54 KK/193 jiwa.

Tabel 2. Jumlah KK/ jiwa yang tergabung dalam IPAL RT 06 Kelurahan Kroman

No.	Jumlah KK yang Tergabung	Sumbangan Rumah (SR)	Tahun
1.	19 KK (68 jiwa)	13 SR	2014
2.	8 KK (32 jiwa)	6 SR	2015
3.	1 KK (2 jiwa)	1 SR	2016
4.	15 KK (57jiwa)	13 SR	2017
5.	1 KK (2 jiwa)	1 SR	2018
6.	1 KK (2 jiwa)	1 SR	2020
7.	1 KK (2 jiwa)	1 SR	2021
Total	46 KK (169 jiwa)	36 SR	

Sumber: Data observasi

Adapun sejumlah masyarakat yang tidak tergabung kedalam IPAL RT 06 Kelurahan Kroman dikarenakan sudah memiliki tangki septik pribadi. Dari data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa saat ini penggunaan IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman sudah didistribusikan hampir merata. Hal demikian didukung oleh kesadaran warga bahwa adanya IPAL dinilai memudahkan akses sanitasi masyarakat. Adanya IPAL RT 06 Kelurahan Kroman juga dinilai memberikan banyak pengaruh positif bagi masyarakat. Dimana masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menahu masalah lingkungan khususnya air limbah kini menjadi lebih tahu tentang pentingnya pengelolaan air limbah melalui program IPAL.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kriteria kecukupan pada program IPAL RT 06 Kelurahan Kroman sudah didistribusikan hampir secara merata, yakni sebagian besar masyarakat RT 06 Kelurahan Kroman sudah merasakan manfaat dari program IPAL. Sebagian kecil masyarakat yang tidak tergabung kedalam IPAL dikarenakan telah memiliki tangki septik

individu. Adapun berdasarkan data terakhir pada observasi disebutkan bahwa jumlah pengguna IPAL RT 06 Kelurahan Kroman saat ini adalah sebanyak 46 KK (169 jiwa) dari 54 KK (193 jiwa)

5. Responsivitas

Menurut William N Dunn kriteria responsivitas berkaitan dengan ukuran suatu kebijakan yang dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam hal kebutuhan dan nilai yang diberikan dari sekelompok tertentu. Kriteria responsivitas menjadi kriteria yang sangat penting karena dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan melalui tanggapan masyarakat dari dampak dan pengaruh yang ditimbulkan dari suatu kebijakan. Tanggapan masyarakat dapat berupa tanggapan yang positif yang berarti dukungan ataupun negatif yang berupa penolakan. Dalam hal ini William N Dunn mengatakan bahwa kriteria responsivitas memiliki pengaruh besar dalam menganalisis kepuasan dari semua kriteria evaluasi yang terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan perataan.

Dalam pengadaan program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman ini tentunya memperoleh beragam respon dari masyarakat. Sebelum didirikan program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman, oleh Dinas Pekerjaan Umum seringkali diadakan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Kroman mengenai pentingnya sanitasi melalui program IPAL untuk menangani masalah air limbah rumah tangga. Adanya sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih peduli dan aktif terhadap lingkungan. Namun pengadaan sosialisasi nyatanya masih belum mampu membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan khususnya pada air limbah rumah tangga.

Pada awal pendirian Program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman, tepatnya pada bulan Desember tahun 2013 sebagian besar masyarakat RT 06 Kelurahan Kroman tidak setuju dan menentang adanya pendirian sebuah IPAL. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ali Santoso, selaku ketua KPP IPAL Karang Pasung dalam wawancara sebagai berikut:

“Masyarakat pada awal pembangunan IPAL banyak yang tidak menrima, mereka berpikir bahwa IPAL itu berbahaya, mereka takut kalau IPAL bisa meledak dan menimbulkan bau tidak sedap. Maka dari itu dulu banyak yang tidak percaya dan tidak ikut bergabung menggunakan IPAL. akhirnya yang tergabung IPAL waktu itu hanya 13 SR saja” (wawancara pada tanggal 06 November, 2021)

Statemen masyarakat dari penjelasan wawancara tersebut diakibatkan karena minimnya pengetahuan

masyarakat tentang fungsi IPAL. Ketidaktertarikan masyarakat atas pengadaan IPAL juga dapat dilihat dari jumlah pengguna awal IPAL-Karang Pasung yang hanya mencapai 34% yakni sebanyak 13 dari 75 Sambungan Rumah.

Hal berbeda ketika program IPAL sudah dijalankan. Seiring berjalannya waktu masyarakat yang pada mulanya menentang program IPAL kini jauh lebih menyambut baik dan memberikan respon positif terhadap keberadaan sistem IPAL-Karang Pasung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ali Santoso sebagai berikut:

“warga awalnya tidak percaya dengan adanya IPAL, tapi seiring berjalannya waktu IPAL ini dinilai memberi banyak manfaat dan dinilai mempermudah sehingga warga tidak perlu mengurus dan tidak keluar biaya. Dari situlah akhirnya seiring berjalannya waktu mulai banyak yang ikut bergabung menggunakan IPAL” (wawancara pada tanggal 06 November, 2021)

Hal demikian dapat dilihat dari jumlah pengguna IPAL RT 06 Kelurahan Kroman yang mengalami kenaikan pada tahun 2017. Masyarakat menilai bahwa adanya program, IPAL dinilai lebih mempermudah masyarakat terutama dalam melakukan kegiatan Buang Air Besar dan pembuangan cairan limbah rumah tangga.

Namun kebermanfaatannya dari program IPAL tersebut hingga saat ini masih belum diimbangi dengan kesadaran dari masyarakat pengguna. Hal ini dapat dilihat pada pola kebiasaan buruk masyarakat untuk tidak membuang sampah/ limbah padat secara sembarangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa selama penggunaannya, IPAL Karang Pasung pernah dua kali mengalami penyumbatan pada bak kontrol akibat pembuangan benda padat oleh warga sekitar berupa kaos, pampers, sendok, dan kumpulan rambut.



Gambar 5. Bak Kontrol IPAL RT 06 Kelurahan Kroman

Sumber: Data observasi

Untuk menangani masalah tersebut, ketua KPP IPAL sigap melapor ke Dinas Pekerjaan Umum dan memberikan sosialisasi kepada warga akan bahaya dari tindakan buang sampah kedalam bak kontrol. Upaya untuk mencegah terjadinya penyumbatan juga rutin dilakukan pengecekan dan pembersihan ke bak kontrol setiap 2-3 minggu sekali oleh KPP IPAL Karang Pasung.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam kriteria responsivitas masyarakat mendukung penuh adanya program IPAL yang sebelumnya melakukan penolakan. Namun peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perawatan IPAL dinilai masih kurang dan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada perilaku masyarakat yang kurang baik seperti masih ditemukan sampah atau limbah padat hasil buangan masyarakat sekitar kedalam saluran pipa yang dapat memicu penyumbatan sistem IPAL.

6. Ketepatan

Kriteria ketepatan merupakan kriteria yang berhubungan dengan penilaian dari sebuah kebijakan yang dianggap mampu menjadi solusi untuk menangani masalah ditengah tengah masyarakat. Kriteria ini digunakan untuk mengukur apakah kebijakan yang ada dapat memecahkan sebuah masalah atau justru sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari dampak dan nilai yang dapat dirasakan oleh sekelompok orang tertentu. Kriteria ketepatan ini menjadi kriteria pelengkap dari evaluasi suatu kebijakan.

Kriteria ini juga menjadi kriteria yang digunakan untuk melihat sejauh mana manfaat dan ketepatan untuk menangani masalah dilingkup masyarakat. Hal demikian dapat dilihat pada tujuan pembangunan program IPAL yang difokuskan pada wilayah miskin padat penduduk dan memiliki kualitas sanitasi rendah. Maka dari itu program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman dinilai tepat dan memberikan banyak manfaat dalam menangani masalah sanitasi di RT 06 Kelurahan Kroman. Terbukti dari hasil observasi dan survey kepuasan masyarakat yang menyatakan bahwa keberadaan IPAL sangat memudahkan, warga tidak perlu melakukan pengurusan dan tidak terbebani pada biaya. Hal inilah yang menjadikan tingkat pemohon penggunaan IPAL seiring berjalannya waktu semakin meningkat.

Nilai ketepatan dan manfaat adanya program IPAL juga dilihat dari tingkat sosial, kesehatan, dan lingkungan masyarakat. Dari segi sosial, masyarakat kini mulai meninggalkan pola kebiasaan buruk salah satunya kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan. Dengan adanya program IPAL, akses BAB masyarakat

dari yang dahulu dibuang kedalam drainase/saluran air, kini sudah tersedia MCK di semua warga RT 06 Kelurahan Kroman dengan sanitasi yang lebih layak. Segi kesehatan masyarakat juga kini jauh terbebas dari berbagai penyakit seperti demam berdarah, penyakit kulit, diare, dan gatal-gatal akibat lingkungan yang tidak bersih dan kumuh. Sedangkan dari segi lingkungan, kini lingkungan di RT 06 Kelurahan Kroman jauh lebih bersih, tertata, dan lebih rapi, dari sebelumnya.

Berdasarkan data hasil observasi dan informan, Indikator ketepatan program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman dinilai sudah optimal karena mampu menjawab permasalahan masyarakat dengan tepat. Adapun nilai ketepatan dan kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pengguna IPAL diantaranya mempermudah masyarakat dalam akses sanitasi terutama Buang Air Besar, MCK (Mandi, Cuci, Kakus) , dan pengolahan limbah rumah tangga. Masyarakat jauh terbebas dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat dan sanitasi yang buruk. Selain itu lingkungan di RT 06 Kelurahan Kroman menjadi lebih bersih, sehat, aman, dan rapi. Maka dari itu adanya program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman dinilai sangat tepat dalam menangani permasalahan sanitasi ditengah masyarakat kumuh miskin kota.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terkait Evaluasi Program IPAL Berbasis Masyarakat di RT 06 Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator efektivitas dalam pelaksanaan program IPAL Komunal di RT 06 Kelurahan Kroman dinilai belum optimal karena pengujian kualitas kadar air tidak dilakukan secara berkala sehingga kualitas baku mutu air terkini belum diketahui. Adapun kinerja KPP lambat laun dinilai kurang optimal karena tidak adanya regenerasi kepengurusan dari periode pertama pembentukan KPP IPAL.
2. Indikator efisiensi dalam pelaksanaan program IPAL Komunal di RT 06 Kelurahan Kroman dinilai optimal dari segi biaya pembangunan dimana program IPAL mendapat bantuan dana dari program USRI sehingga pembangunan program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman berjalan sesuai yang diharapkan. Namun dari segi biaya operasional maupun waktu pembangunan program IPAL dinilai masih belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat yang kurang untuk berpartisipasi dalam perawatan IPAL.

3. Indikator kecukupan dalam program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman dinilai sudah optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan adanya program IPAL dapat memberikan manfaat yang jauh ketimbang sebelum adanya IPAL. Adapun manfaat yang sangat dirasakan adalah tingkat pencemaran pada limbah cair semakin berkurang dan menjadikan kampung RT 06 Kelurahan Kroman kini lebih tertata rapi, bersih, dan sehat sehingga meminimalisir penyebaran penyakit.
4. Indikator perataan dalam program IPAL Komunal di RT 06 Kelurahan Kroman dinilai optimal karena penggunaan IPAL di RT 06 Kelurahan kroman ini sudah didistribusikan hampir merata. Warga yang tergabung dalam penggunaan IPAL merasakan pengaruh positif dan manfaat keberadaannya. Adapun jumlah pengguna IPAL-Karang Pasung saat ini adalah sebanyak 46 KK (169 jiwa dari 200 jiwa). Beberapa warga yang tidak tergabung kedalam penggunaan IPAL dikarenakan sudah memiliki tangki saptik pribadi.
5. Indikator responsivitas dalam program IPAL di RT 06 Kelurahan Kroman dinilai belum optimal. Program IPAL mendapat respon baik dari masyarakat setelah adanya penolakan. Namun nyatanya pola kebiasaan masyarakat masih dinilai buruk dan belum memiliki kesadaran sepenuhnya untuk merawat IPAL. Hal ini dikarenakan masih ditemukan masalah pada IPAL yang dua kali mengalami openyumbatan akibat masyarakat yang membuang sampah dan limbah padat kedalam saluran perpipaan yang dapat menimbulkan penyumbatan pada IPAL.
6. Indikator ketepatan dalam program IPAL Komunal di RT 06 Kelurahan Kroman dinilai optimal dan sangat tepat karena keberadaannya mampu menangani masalah sanitasi dimana kini masyarakat tidak lagi melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melainkan kedalam kakus yang telah disambungkan kedalam IPAL sehingga menguurangi resiko tingginya pencemaran limbah domestik yang dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki penerapan program IPAL Berbasis Masyarakat di RT 06 Kelurahan Kroman adalah sebagai berikut:

1. Pengujian kualitas pada kadar air pada IPAL RT 06 Kelurahan Kroman hendaknya dilakukan secara berkala sesuai Peraturan Daerah agar kualitas baku mutu air dapat diketahui.

2. Sebaiknya diadakan regenerasi kepengurusan IPAL agar memunculkan penyegaran dalam menggerakkan kesadaran warga dan menumbuhkan inovasi terhadap perawatan IPAL.
3. Perlunya kesepakatan bersama dalam penegasan dan sanksi terhadap warga yang membuang sampah atau limbah padat kedalam bak kontrol
4. Diberlakukan peraturan tertulis dan konsekuensi bagi masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam biaya operasional IPAL berdasarkan kesepakatan.
5. Penggunaan dan perawatan IPAL oleh masyarakat hendaknya dilakukan peninjauan serta evaluasi secara rutin oleh pemerintah yang terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan jurnal ini, diantaranya:

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing.
3. Bapak Tauran S.Sos.,M.Soc.Sc. Selaku Dosen Penguji.
4. Bapak Badrudin Kurniawan S.AP., M.AP. Selaku Dosen Penguji .
5. Bapak Ali Santoso selaku Ketua KPP IPAL Karang Pasung Kelurahan Kroman.
6. Alm. Bapak Suseno dan Ibu Anik Rosyidah selaku orangtua penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
7. Seluruh rekan dan pihak-pihak yang terlibat khususnya ketiga saudara saya, Dwita Agustina, dan Achmad Zaenal Abidin yang senantiasa memberikan support kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Washil. 2020. "Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2020." 54.
- Afandi, Yusdi Vari, Henna Rya Sunoko, and K. Kismartini. 2014. "Status Keberlanjutan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Komunal Berbasis Masyarakat Di Kota Probolinggo." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 11(2):100. doi: 10.14710/jil.11.2.100-109.
- Angraini, Novita. 2017. "Evaluasi Program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Di Batu Cermin RT 06 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara." *Jurnal Paradigma* 6(1):4954-66.
- Bintoro, G. 2018. Pemeliharaan Fasilitas Water TAP (Studi Kasus pada ITB dan UNS). *Journal of*

Public Sector Innovations. 2(2)

- Iskandar, S., Fransisca, I., Arianto, E., & Ruslan, A. (2016). Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Terpusat Skala Permukiman. *Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya*, 1–64. <https://www.iuwashplus.or.id/cms/wp-content/uploads/2017/04/Buku-San2-SPALD-Terpusat.pdf>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. “Peraturan Menteri LHK No.68 Th 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.” *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan* 68:1–13.
- Lutfiansyah, Husni Arief. 2012. “Evaluasi Implementasi Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta.” *Digilib.Uns.Ac.Id* 1–91.
- Mulia, G. J. T. (2015). *Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal di Kabupaten Gresik*. 1–6. <https://repository.its.ac.id/id/eprint/73200>
- Novianty, Aulia Putri, & Kurniawan, B., 2021. “Analisis Penerapan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Rsdk) Kota Surabaya.” *Publika* 9(3):1–12. doi: 10.26740/publika.v9n3.p1-12.
- Palangda, Diaz. (2015). *Evaluasi Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Berbasis Masyarakat di kecamatan Tallo Kotamadya Makassar*. 5 (December), 118–138.
- Pengembangan Kawasan Permukiman dalam SPKP Kabupaten Gresik*. (2021). <http://sipkp.ciptakarya.pu.go.id/internal/page/recor d/view/?id=1124&data=11>. Diakses pada 20 Oktober 2021
- Program Percepatan Road Map Kab . Gresik Dalam PPSP*. (2014). <https://www.slideshare.net/obburr/implementasi-ppsp-kab-gresik-nop-14>
- Timur, P. J. (2015). *Provinsi jawa timur*. 6, 1–25.
- Prastowo, Ichwan. 2016. “Usaha Peningkatan Pola Hidup Sehat Yang Hygiene Sanitasi Dengan Pengadaan Sanitasi Lingkungan Yang Berbasis Masyarakat Di Kalurahan Tegalgede Karanganyar.” *Hotelier Journal Politeknik Indonesia Surakarta* 2(2):27–31.
- Pratiwi, Indah Nur. 2019. “Evaluasi Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Komunal Di Dusun Sukunan.” 14.
- Putri, Novellita M.P., & Megawati, S., 2022. “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Kcamatan Sidoarjo” *Jurnal Publika.Vol 9.No.5*
- Rahmadani, Rizky Dwi. 2020. “Perilaku Masyarakat Dalam Pembuangan Tinja Ke Sungai Di Kelurahan Rangkah, Surabaya.” *Jurnal Promkes* 8(1):87. doi: 10.20473/jpk.v8.i1.2020.87-98.
- Rande, S. (2017). Evaluasi Program Intalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Di Batu Cermin RT 06 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara. *Jurnal Paradigma*, 6(1), 4954–4966. <http://dx.doi.org/10.30872/jp.v6i1.443>
- Rheingans, Christine L. Moe and Richard D. 2005. “Global Challenges in Water, Sanitation and Health.” *Journal of Water and Health* 3(3):313–24. doi: 10.2166/wh.2005.039.
- Sapuro, James T. 2016. “Rencana Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya.” *Euphytica* 18(2):22280.
- Susanti, Reni. (2020). “Resiko Mengintai, 8,6 Juta Rumah Tangga di Indonesia BAB Sembarangan”<https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2020/02/06/124423720/risiko-mengintai-86-juta-rumah-tangga-di-indonesia-bab-sembarangan>. Diakses pada 20 Oktober 2020
- Tatik, Aning I.S., & Tauran. 2022. “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH) 2014 di Desa Tawang Sari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Publika.Vol 10.No.2*
- Tendean, Cynthia, Sonny Tilaar, dan Hendriek H. Karongkong. 2014. “Pengelolaan Air Limbah Domestik di Permukiman Kumuh di Kelurahan Calaca dan Istiqlal Kecamatan Wenang.” *Sabua* Vol.6.